

## **Pengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern serta *Good Government Governance* terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Bandung**

**Tami Nisita Rahmani<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan  
Indonesia, Bandung  
[taminisitarahmani@gmail.com](mailto:taminisitarahmani@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to investigate the impact of implementing an internal control system and good government governance on the performance of the Bandung City Regional Government Service. Data for this research was obtained through distributing questionnaires to 17 agencies operating in the city of Bandung. The Department's performance assessment is based on the "value for money" indicator. The method used in this research is the associative method. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression analysis with the support of SPSS version 22 software for Windows. The research results show that individually, the internal control system has a significant influence on the performance of the Bandung City Department. On the other hand, good government governance does not have a partially significant influence on the performance of the Bandung City Department.*

**Kata Kunci:** Good Governance, Sistem Pengendalian Interns, Dinas Kota Bandung

### **PENDAHULUAN**

Dengan diberlakukannya prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu lebih efektif dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai potensi daerahnya sendiri, yang dapat diperluas dan dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, Pemerintah Daerah juga tetap berkewajiban untuk sejalan dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mereka harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari koordinasi nasional.

Salah satu strategi utama yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara rutin dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip otonomi daerah serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Organisasi sektor publik, sebagai entitas yang bergerak dalam menyediakan barang dan pelayanan publik, memiliki orientasi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi sektor publik harus selalu berfokus pada kepentingan masyarakat dan

memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka. Karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada organisasi sektor publik untuk melayani mereka, maka kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting dan menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai apakah kepercayaan tersebut digunakan dengan baik atau tidak.

Evaluasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah dianggap sebagai tindakan yang sangat penting. Bagi lembaga pemerintah, mengukur kinerja dalam sektor publik adalah suatu keharusan. Hal ini ditegaskan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang kemudian digantikan oleh PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta PP No. 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Kedua PP tersebut dengan jelas meminta agar pertanggungjawaban kepala daerah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk menjelaskan bagaimana dana yang diperoleh dari masyarakat atau sumber lainnya telah digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kinerja pemerintah yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik sering disebut sebagai *good governance*. United Nations Development Program (UNDP) telah merumuskan beberapa prinsip *good governance*, seperti partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. *Good governance* digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya oleh Aisyah et al (2014) juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara berkala dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dasar hukum untuk EKPPD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EKPPD dapat dianggap sebagai suatu model evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut laporan dari Senior Advisor Kemitraan, Abdul Malik Gisamar, yang disampaikan melalui kemendagri.go.id, hasil penelitian oleh Kemitraan mengenai Indeks Tata Kelola Pemerintahan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih sangat rendah. Dari 33 provinsi yang telah diteliti, hanya dua provinsi yang memiliki Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dua provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. "Dari 33 provinsi tersebut, rata-rata nilai yang diperoleh hanya sekitar 3,55 dari nilai maksimal 10. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi masih sangat buruk," ungkap Abdul Malik Gisamar.

Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat belum mencapai tingkat tata kelola pemerintahan yang memadai. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Konsep ini telah menjadi pusat perhatian dalam ilmu politik, terutama dalam administrasi sektor publik, dan merujuk pada suatu proses di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola ekonomi mereka sendiri, serta mengatur institusi dan sumber daya sosial dan politiknya. Konsep ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk mencapai kohesi sosial, integrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis memilih untuk meneliti Kota Bandung karena kota ini telah mengalami perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Kota Bandung melalui program-program inovatif dan kreatif yang diperkenalkan selama kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil. Kota Bandung juga telah meraih banyak penghargaan dan mencapai peringkat yang memuaskan dalam upaya memajukan kota tersebut. Namun, menurut informasi yang ditemukan di Metrotvnews.com, Kota Bandung berada di peringkat kedua dalam indeks kepuasan atau kinerja pemerintahan tertinggi di Jawa Barat, di bawah Kota Sukabumi. Hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) dan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Unpad Bandung mengenai Kepuasan Publik terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Kota Sukabumi menduduki peringkat tertinggi dalam aspek kepemimpinan. Kota Bandung menduduki peringkat kedua, disusul oleh Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya. Hasil survei tersebut juga disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.** Tingkat Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah

<b>Kota/Kabupaten Jawa Barat</b>	<b>Tingkat Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah</b>
<b>Sukabumi</b>	3,69
<b>Bandung</b>	3,67
<b>Bogor</b>	3,66
<b>Purwakarta</b>	3,49
<b>Tasikmalaya</b>	3,44

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pimpinan daerah dapat menjadi indikasi kualitas kinerja pemerintahannya. Kinerja pemerintah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan menciptakan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah buruk, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.

Sebagai contoh, dalam sebuah laporan yang ditemukan di website regional.kompas.com pada tanggal 12 Januari 2016, disebutkan bahwa Walikota Bandung mengambil keputusan untuk memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Alasan di balik keputusan tersebut adalah banyak program Dinas Perhubungan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai berbagai program tersebut telah mencapai Walikota Bandung. Program yang tidak berjalan sesuai rencana meliputi berbagai aspek seperti marka jalan, reformasi angkutan umum, taksi tanpa argo, monopoli taksi, berhentinya layanan Trans Metro Bandung, keterlambatan proyek cable car, dan lain sebagainya.

Selain itu, tahun 2015 juga menyaksikan masalah kinerja Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung. Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota Bandung terlibat dalam dugaan korupsi dalam proyek pembangunan stadion utama Gelora Bandung Lautan Api di Gede Bage, Bandung. Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Sekretaris Dinas tersebut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan stadion yang menghabiskan dana sekitar Rp 545 miliar.

Dari permasalahan yang muncul dalam kinerja dinas di Kota Bandung, terlihat bahwa kinerjanya masih belum mencapai standar kualitas yang baik. Peningkatan kinerja organisasi pemerintah adalah suatu keharusan yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saat ini, Pemerintah Kota Bandung sedang melakukan reformasi birokrasi dengan mengadopsi sistem akuntabilitas guna mempermudah layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengendalian internal memegang peran penting. Kegagalan dalam mencapai good governance dalam suatu pemerintahan seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal di organisasi pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance yang seharusnya diterapkan. Sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), SPIP adalah proses yang integral dalam aktivitas organisasi yang dijalankan dengan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP melibatkan sejumlah aktivitas seperti audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien demi kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif, diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai Sistem Pengendalian Intern di Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2014, terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Salah satu temuan utama adalah adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Selain itu, juga terdapat kelemahan dalam pengelolaan pendapatan retribusi Sarana Olahraga (SOR) dan Gelanggang Olahraga (GOR) di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang tidak tertib.

Sistem pengendalian intern pemerintah di Kota Bandung seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Kinerja sebuah instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana mereka berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi, misi, dan strategi instansi tersebut. Kinerja ini mencerminkan tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Argo Trihapsoro pada tahun 2015, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Fenomena ini menggambarkan bahwa kinerja dinas di Kota Bandung masih memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Tinjauan Konseptual tentang *Good Governance*

Good Governance merupakan faktor kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kata "Governance" dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "Kepemerintahan" dan merujuk pada cara pengelolaan urusan pemerintahan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Menurut United Nations Development Program (UNDP), Governance dapat didefinisikan sebagai:

*“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”*

yang dapat diartikan bahwa *governance* adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk strategi jangka panjang, untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek finansial tidak lagi dianggap memadai. Oleh karena itu, diperlukan alat pengukuran kinerja yang komprehensif, yang mampu memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern dianggap sebagai alat yang relevan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang



efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian oleh Irine Chintya (2015) juga telah membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

### **Tinjauan tentang Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik**

Pengukuran kinerja adalah aspek penting dalam manajemen organisasi, termasuk dalam konteks organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja memiliki peran vital dalam mengevaluasi akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan dengan tiga tujuan utama. Pertama, membantu meningkatkan kinerja pemerintah dengan fokus pada tujuan dan sasaran unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, pengukuran kinerja digunakan untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, untuk memastikan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi lembaga (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja diharapkan dapat mendukung penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya memastikan hasil pengukuran kinerja yang obyektif dan komprehensif yang mencakup aspek yang nyata dan tidak nyata, metode pengukuran kinerja harus dirancang secara cermat agar dapat mencerminkan dengan baik. Dalam penelitian ini, metode *value for money* dipilih untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah. Penilaian kinerja pemerintah tidak hanya melihat output yang dihasilkan, tetapi juga harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti memperoleh input dengan kualitas dan jumlah tertentu dengan biaya yang minimal. Efisiensi mencapai hasil output maksimum dengan input yang diberikan. Sedangkan efektivitas berarti mencapai hasil program sesuai dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban terkait pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: pengadaan dan alokasi sumber daya yang

ekonomis, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif. Walaupun tiga elemen tersebut menjadi pokok *Value for Money*, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja mungkin belum mencukupi (Mardiasmo, 2009).

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang diberikan kepada sejumlah responden. Responden dalam penelitian ini meliputi seluruh Dinas yang ada di Kota Bandung, yang berjumlah sebanyak 17 Dinas. Kuesioner disebarkan kepada berbagai jabatan di dalam Dinas, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kabag/Kabid yang ada di setiap Dinas tersebut. Setelah data terkumpul, penelitian kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang menjadi perhatian, yaitu dua variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Intern dan Good Government Governance, serta satu variabel dependen, yaitu Kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yang merupakan alat untuk mengumpulkan data dengan cara menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan cermat berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua, penulis juga melakukan telaah kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan kepustakaan bertujuan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Sistem Pengendalian Intern pada Dinas-Dinas di Kota Bandung**



Menurut COSO, pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya. Proses ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yang terkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian intern adalah suatu proses yang melekat dalam tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Variabel  $X_1$

<b>Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>%</b>
<b>1. Lingkungan Pengendalian</b>	87,56%
<b>2. Penilaian Resiko</b>	78,64%
<b>3. Kegiatan Pengendalian</b>	87,05%
<b>4. Informasi Dan Komunikasi</b>	86,14%
<b>5. Pemantauan</b>	90,23%
	86,52%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Dari tabel tersebut diperoleh rata-rata 86,52%. Berdasarkan tabel intreprtasi 86,52% berada pada kisaran 84% - 100%, yang termasuk kedalam kategori sangat memadai. Namun berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan sistem pengendalian itu sendiri khususnya di Dinas Kota Bandung.

### **Penerapan *Good Government Governance* pada Dinas-Dinas di Kota Bandung**

Menurut UNDP, governance merujuk pada pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola masalah bangsa. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Sujardi (2009), untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa sesuai dengan cita-cita dan menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, diperlukan perubahan, salah satunya adalah perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan Good Government Governance.

**Tabel 3.** Rekapitulasi Variabel X<sub>2</sub>

<i>Penerapan Good Government Governance</i>	<i>%</i>
<i>Participation</i>	71,82%
<i>Rule Of Law</i>	79,09%
<i>Transparancy</i>	84,32%
<i>Responsiveness</i>	85,00%
<i>Consensus orientation</i>	80,45%
<i>Equity</i>	75,45%
<i>Effectiveness and Effeciency</i>	83,18%
<i>Accountability</i>	87,73%
<i>Strategic Vision</i>	89,55%
	80,98%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Berdasarkan data dalam tabel, variabel good government governance memiliki rata-rata sebesar 80,98%. Dari tabel interpretasi, angka ini berada dalam kisaran 68% hingga 83,99%, yang mengindikasikan bahwa variabel ini mendapatkan penilaian sebagai "memadai." Oleh karena itu, penerapan good government governance di Dinas Kota Bandung dianggap sudah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai kriteria yang sangat memadai.

### **Kinerja Dinas-Dinas di Kota Bandung**

Menurut Mahsun (2014), kinerja merujuk pada gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi yang diatur dalam rencana strategis organisasi. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas yang menggabungkan berbagai fungsi dan operasi yang beragam, yang bekerja secara terstruktur demi mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi ini harus bekerja sama dengan teratur guna mencapai kinerja yang optimal.

**Tabel 4.** Rekapitulasi Variabel Y

**Kinerja Dinas Kota Bandung %**

<b>1. Ekonomi</b>	81,91%
<b>2. Efisiensi</b>	78,33%
<b>3. Efektifitas</b>	88,94%
	82,85%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Dinas di Kota Bandung mencapai 82,85%. Dalam konteks interpretasi tabel, angka ini masuk dalam kategori penilaian yang memadai, yang berkisar antara 68% hingga 83,99%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan konsep value for money dengan baik dalam kerjanya.

**Pengujian Hipotesis**

Sejalan dengan fokus penelitian, masalah yang dianalisis adalah dampak dari implementasi sistem pengendalian intern dan good government governance terhadap kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. Untuk menilai sejauh mana dampaknya, analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat uji hipotesis, dan data dianalisis dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS 22 for Windows.

**Tabel 5.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,880	4,831		2,459	,018
	SPI_X1	,211	,100	,348	2,103	,042
	GGG_X2	,314	,171	,305	1,839	,073

a. Dependent Variable: Kinerja\_Y

Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis

Hasil perhitungan menunjukkan nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 11,880, koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,211, dan koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,314. Dengan demikian, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 11,880 + 0,211X_1 + 0,314X_2 + \epsilon$$

Untuk menilai dampak masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan uji t yang menghasilkan nilai thitung untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil uji t, nilai thitung untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X1) adalah 2,103 dengan nilai Sig sebesar 0,042. Nilai ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel (2,021) dan Sig lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Artinya, Sistem Pengendalian Intern (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Kota Bandung. Namun, berdasarkan hasil uji t, nilai thitung untuk variabel Good Government Governance (X2) adalah 1,839 dengan nilai Sig sebesar 0,073. Nilai ini menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (1,990) dan Sig lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (Ho) diterima, dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Ini berarti Good Government Governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Dinas Kota Bandung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Dinas Kota Bandung. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPI di Dinas Kota Bandung, semakin tinggi pula kinerja dinas tersebut. Temuan ini didukung oleh tanggapan responden yang menyatakan bahwa SPI di Dinas Kota Bandung sudah cukup memadai, yang sejalan dengan pencapaian kinerja positif. *Kedua*, Penerapan prinsip Good Government Governance (GGG) pada Dinas Kota Bandung dinilai memadai secara umum. GGG yang diterapkan di Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai sudah baik meskipun belum mencapai kriteria sangat memadai. Beberapa prinsip GGG masih belum sepenuhnya diterapkan di beberapa dinas, yang tercermin dari jawaban "tidak pernah" dari sebagian responden dalam beberapa pertanyaan terkait GGG. *Ketiga*, Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Good Government Governance (GGG) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Kota Bandung, meskipun nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif. Artinya, meskipun GGG diterapkan dengan baik, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dinas tersebut. Demikianlah simpulan dari penelitian ini, yang

menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dinas, sementara GGG, meskipun diterapkan dengan baik, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dinas.

## REFERENSI

- Aisyah, S., dkk. (2014). *Pengaruh good governance, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten kampar)*. Jurnal: Universitas Riau.
- Arti, A.S. (2009). *Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dinas pendidikan kota depok*. Jurnal: Universitas Gunadarma.
- Arikunto, S. (2010) .*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azlina, N. & Amelia, I. (2014). *Pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan*. Jurnal: Universitas Riau.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- COSO. (2013). *Internal control-integrated framework: Executive Summary*. Durham, NorthCarolina, May 2013
- Ery, I.B.P, dkk. (2014). *Analisis pengaruh sistem pengendalian internal, organization citizenship behaviour dan good government governance terhadap kinerja organisasi berdasarkan perspektif balanced scorecard (studi kasus pada dinas pendapatan kabupaten buleleng)*. Jurnal: Universitas Udayana.
- Halim, A. (2010). *Akuntansi daerah sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B .(2011). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. (2014). *Evaluasi pemerintahan daerah tak sekedar tugas pemerintah*. [Online]. Tersedia: <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/04/03/evaluasi-pemerintahan-daerah-tak-sekedar-tugas-pemerintah>. [22 Februari 2016]
- Kota Bandung. (2015). *Profil skpd*. [Online]. Tersedia: <http://portal.bandung.go.id/>. [30 Januari 2016]
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014
- Mahmudi. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFY.
- Mangkunegara, A.P. (2005). *Evaluasi kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

- Metrotvnews. (2015). *Kepuasan kinerja pemerintah dinilai kurang, sekda kota bandung: ini pecut.* [Online]. Tersedia: <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/11/19/452265/kepuasan-kinerja-pemerintah-dinilai-kurang-sekda-kota-bandung-ini-pecut>. [16 Februari 2016]
- Mustakini, J.H. (2009). *Sistem informasi teknologi*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, dkk. (2010). *Akuntansi sector publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Regional Kompas. (2015). *Jadi tersangka korupsi stadion gede bage, ini komentar sekretaris dinas.* [Online]. Tersedia: <http://regional.kompas.com/read/2015/03/25/18100571/Jadi.Tersangka.Korupsi.Stadion.Gede.Bage.Ini.Komentar.Sekretaris.Dinas>. [1 mei 2016].
- Regional Kompas. (2016). *Ridwan kamil copot kadishub bandung, jabatan kosong dilelang.* [Online]. Tersedia: <http://regional.kompas.com/read/2016/01/12/13015911/Ridwan.Kamil.Copot.Kadishub.Bandung.Jabatan.Kosong.Dilelang>. [ 1 mei 2016].
- Riduwan dan Sunarto. (2012). *Pengantar statistik untuk penelitian pendidikan, sosial, komunikasi, ekonomi dan bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rinawati, M. (2013). *Pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman good government governance terhadap Kinerja auditor (studi pada auditor pemerintah di bpk ri perwakilan lampung*. Jurnal: Universitas Lampung
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis, edisi 4, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2014). *Research methods for business metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif & rnd)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & rnd*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. (2008). *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyadi dan Purwanto. (2008). *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*. Jakarta: Salemba Empat.



- Sujardi. (2009). *Pengembangan kinerja pelayanan publik*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sujarweni, W. (2015). *Statistik untuk bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis system informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutarman. (2012). *Pengantar teknologi informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufik, T. dan Kemala, D. (2013). *Pengaruh pemahaman prinsip-prinsip good government governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik*. Jurnal: Universitas Riau.
- Tresnawati, R. (2012). Pengaruh efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas pendapatan daerah kota bandung. Jurnal: Universitas Widyatama.
- Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. (2007). *United nations development programme: indonesia*. retrieved 24 may 2007. [Online]. Tersedia :<http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>. [17 Desember 2015].